

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diambil langsung dari kantor (BPK-RI. Perwakilan Provinsi Lampung) dan melalui situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yaitu www.bpk.go.id. Populasi yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *random sampling*, yaitu pemilihan sampel secara acak dengan probabilitas yang sama.

Tabel 4.1
Daftar Sampel

No.	Kabupaten/Kota
1	Kota Bandar Lampung
2	Kab. Lampung Barat
3	Kab. Lampung Selatan
4	Kab. Lampung Tengah
5	Kab. Lampung Timur
6	Kab. Lampung Utara
7	Kab. Mesuji
8	Kota Metro
9	Kab. Pesawaran
10	Kab. Pesisir Barat

11	Kab. Pringsewu
12	Kab. Tanggamus
13	Kab. Tulang Bawang
14	Kab. Tulang Bawang Barat
15	Kab. Way Kanan

4.2 Hasil

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi. Pengukuran nilai rata-rata (*mean*) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data, sedangkan standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Statistitik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah Daerah	45	13.56153	15.21538	14.4929747	.34334828
Kemakmuran Intergovernmental Revenue	45	.01633	.29442	.0672689	.06006259
Temuan Audit BPK	45	.55134	.94239	.7608491	.07825064
Opini Audit BPK	45	.00000	.62696	.0467271	.12799496
Kinerja Keuangan	45	1	5	4.47	.991
Valid N (listwise)	45	.77726	1.02482	.9417696	.05853565

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.2 dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan natural log (Ln) dari total asset menunjukkan nilai minimum sebesar 13,56153 dan nilai maksimum sebesar 15,21538 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 14,49297 dengan standar deviasi sebesar 0,34335. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki hasil yang baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*). Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran pemerintah daerah terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2015 sedangkan Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran pemerintah daerah tertinggi adalah Kota Bandar Lampung pada tahun 2017.

2. Kemakmuran

Kemakmuran yang diukur dengan menggunakan natural log (Ln) dari total asset menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01633 dan nilai maksimum sebesar 0,29442 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,06727 dengan standar deviasi sebesar 0,06006. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemakmuran memiliki hasil yang baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*). Pemerintah Daerah yang memiliki kemakmuran terendah adalah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016 sedangkan Pemerintah Daerah yang memiliki kemakmuran tertinggi adalah Kota Bandar Lampung pada tahun 2017.

3. *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental revenue yang diukur dengan membagi total dana perimbangan dengan total pendapatan menunjukkan nilai minimum sebesar 0,55134 dan nilai maksimum sebesar 0,94239 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,76085 dengan standar deviasi sebesar 0,07825. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* memiliki hasil yang baik karena

standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*). Pemerintah Daerah yang memiliki *intergovernmental revenue* terendah adalah Kabupaten Mesuji pada tahun 2017 sedangkan Pemerintah Daerah memiliki *intergovernmental revenue* tertinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015.

4. Temuan Audit BPK

Temuan audit BPK yang diukur dengan membagi temuan audit BPK (Rupiah) dengan total anggaran belanja menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00000 dan nilai maksimum sebesar 0,62696 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,04673 dengan standar deviasi sebesar 0,12799. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa temuan audit BPK memiliki hasil yang kurang baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*). Pemerintah Daerah yang memiliki temuan audit BPK tertinggi adalah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2017.

5. Opini Audit BPK

Opini Audit BPK yang diukur dengan memberikan nilai 5 untuk WTP, 4 untuk WTP-DPP, 3 untuk WDP, 2 untuk TW dan 1 untuk TMP menunjukkan nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,47 dengan standar deviasi sebesar 0,991. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa opini audit BPK memiliki hasil yang baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*). Pemerintah Daerah yang memiliki opini audit BPK terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2015.

6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan yang diukur dengan membagi realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan menunjukkan nilai minimum sebesar 0,77726 dan nilai maksimum sebesar 1,02482 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,94177 dengan standar deviasi sebesar 0,05854. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa kinerja keuangan memiliki hasil yang baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*). Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja keuangan terendah adalah Kota Bandar Lampung pada tahun 2017 sedangkan Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja keuangan tertinggi adalah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2015.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini uji normalitas diukur menggunakan nilai signifikan pada hasil analisis *one-sample kolmogorov-smirnov test* dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian ini dinyatakan normal. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0.000000
	Std. Deviation	.05064649
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.066
	Negative	-.112
Kolmogorov-Smirnov Z		.753
Asymp. Sig. (2-tailed)		.622

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Olah data SPSS V.20 2018

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang dipaparkan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,622 yang berarti Sig. > 0,05 (5%) yang artinya sampel terdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas diukur dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, yaitu jika angka *tolerance* > 0,1 dan *Variance Inflation Faktor* (VIF) < 10. Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
Ukuran Pemerintah Daerah	.663	1.508
Kemakmuran	.588	1.702
Intergovernmental Revenue	.743	1.347
Temuan Audit BPK	.620	1.613
Opini Audit BPK	.622	1.607

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

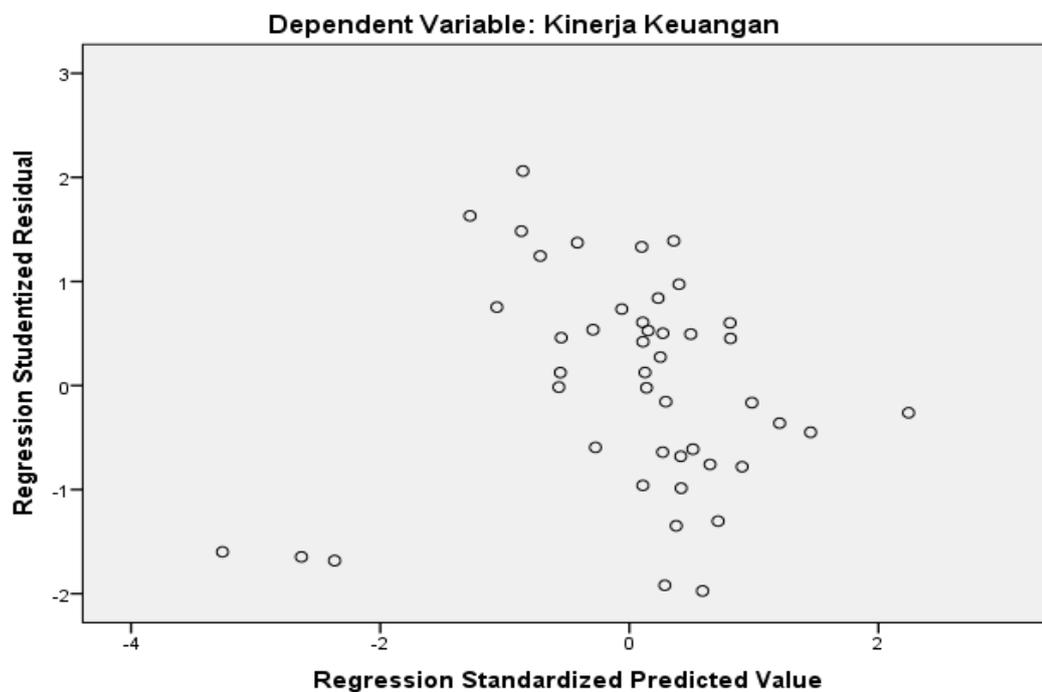
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen memiliki angka *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10 sehingga variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas diukur dengan melihat grafik *Scatter Plot* dimana model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5

Scatterplot



Sumber : Data diolah dengan SPSS V.20, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas tidak menggambarkan pola yang jelas atau menyebar, titik-titik penyebaran berada di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW Tes). Adapun hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.501 ^a	.251	.155	.05379519	1.519

a. Predictors: (Constant), Opini Audit BPK, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.20, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.6 maka nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,519 dengan nilai tabel menggunakan Sisnifikan 0,05 (5%). Jumlah sampel ($n = 40$) dan jumlah variabel independen ($k = 6$, jadi $k - 1 = 5$), maka tabel *Durbin-Watson* (DW) akan didapatkan nilai sebagai berikut:

N	k = 5	
	DL	DU
45	1,2874	1,7762

Sumber : Tabel Durbin Watson

Hasil dari output yang terdapat pada tabel 4.6 nilai *Durbin-Watson* (DW) menunjukkan bahwa $DW \leq 4 - DU$ yaitu $1,519 \leq 2,2238$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$KK = \alpha + \beta_1 UP + \beta_2 KM + \beta_3 IR + \beta_4 TA + \beta_5 OA + \epsilon$$

Keterangan :

KK = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien Regresi

UP = Ukuran Pemerintah Daerah

KM = Kemakmuran

IR = *Intergovernmental Revenue*

TA = Temuan Audit BPK

OA = Opini Audit BPK

ϵ = Error

Hasil uji hipotesis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.595	.435		3.668	.001
Ukuran Pemerintah Daerah	-.045	.029	-.262	-1.539	.132
1 Kemakmuran	-.260	.176	-.266	-1.474	.149
Intergovernmental Revenue	.036	.120	.049	.302	.764
Temuan Audit BPK	-.006	.080	-.013	-.076	.940
Opini Audit BPK	-.004	.010	-.059	-.339	.737

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.20, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.7 hasil persamaan regresi yang diperoleh pada penelitian ini adalah :

$$KK = 1.595 - 0.045 UP - 0.260 KM + 0.036 IR - 0.006 TA - 0.004 OA + \epsilon$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut maka dapat diartikan bahwa:

1. Nilai konstanta dalam penelitian ini sebesar 1,595 yang berarti bahwa jika variabel bebas dalam penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah (X_1), kemakmuran (X_2), *intergovernmental revenue* (X_3), temuan audit BPK (X_4) dan opini audit BPK (X_5) tidak ada atau bernilai nol maka nilai variabel terikat yaitu harga saham (Y) sebesar 1,595.
2. Nilai koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah sebesar -0,045 yang berarti bahwa setiap peningkatan/penurunan nilai dari variabel *Return On Asset* sebesar satu satuan prediksi akan menurunkan (-) nilai variabel harga saham sebesar -0,045.
3. Nilai koefisien regresi variabel kemakmuran sebesar -0,260 yang berarti bahwa setiap peningkatan/penurunan nilai dari variabel struktur modal sebesar satu satuan prediksi akan menurunkan (-) nilai variabel harga saham sebesar -0,260.
4. Nilai koefisien regresi variabel *intergovernmental revenue* sebesar 0,036 yang berarti bahwa setiap peningkatan/penurunan nilai dari variabel kebijakan deviden sebesar satu satuan prediksi akan meningkatkan (+) nilai variabel harga saham sebesar 0,036.
5. Nilai koefisien regresi variabel temuan audit BPK sebesar -0,006 yang berarti bahwa setiap peningkatan/penurunan nilai dari variabel kepemilikan manajerial sebesar satu satuan prediksi akan menurunkan (-) nilai variabel harga saham sebesar -0,006.
6. Nilai koefisien regresi variabel opini audit BPK sebesar -0,004 yang berarti bahwa setiap peningkatan/penurunan nilai dari variabel ukuran perusahaan sebesar satu satuan prediksi akan menurunkan (-) nilai variabel harga saham sebesar -0,004.

4.2.3.2 Koefisien Determinan (R^2)

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *R-Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya manajemen laba yang dapat

dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Adapun hasil model regresi yang diperoleh dari nilai *R-Square* pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.8.

Tabel 4.8
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.501 ^a	.251	.155	.05379519

a. Predictors: (Constant), Opini Audit BPK, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.20, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai *R-Square* untuk variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Audit BPK dan Opini Audit BPK diperoleh sebesar 0,251. Hal ini berarti bahwa 25,1% dari Kinerja Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 74,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan oleh penelitian ini.

4.2.3.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan uji F yang terdapat pada tabel Anova. Adapun hasil uji kelayakan model (uji F) pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.9.

Tabel 4.9
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.038	5	.008	2.619	.039 ^b
Residual	.113	39	.003		
Total	.151	44			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Opini Audit BPK, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK

Sumber : Olah data SPSS V.20,2018

Berdasarkan tabel 4.9 ANOVA diperoleh koefisien signifikan menunjukkan nilai signifikan 0,039 dengan nilai F_{hitung} 2,619 dan F_{tabel} 2,45. Hal ini berarti bahwa $Sig. < 0,05$ dan $F_{tabel} > F_{hitung}$ dan bermakna bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kinerja Keuangan atau dapat dikatakan bahwa Variabel Independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

4.2.3.4 Uji Hipotesis (Uji T)

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan jika t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_0 diterima, sedangkan jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_0 ditolak. Uji t juga dapat dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Adapun hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.10.

Tabel 4.10
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.595	.435		3.668	.001
1 Ukuran Pemerintah Daerah	-.045	.029	-.262	-1.539	.132
Kemakmuran	-.260	.176	-.266	-1.474	.149

Intergovernmental Revenue	.036	.120	.049	.302	.764
Temuan Audit BPK	-.006	.080	-.013	-.076	.940
Opini Audit BPK	-.004	.010	-.059	-.339	.737

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.10 maka dapat dijelaskan hasil pengujian pada masing-masing hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $(-1,539 < 2,017)$ dengan nilai Sig. $0,132 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan menolak H_1 yang artinya bahwa tidak ada pengaruh antara Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan.

2. Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $(-1,474 < 2,017)$ dengan nilai Sig. $0,149 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan menolak H_2 yang artinya bahwa tidak ada pengaruh antara Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan.

3. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $(0,302 < 2,017)$ dengan nilai Sig. $0,764 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan menolak H_3 yang artinya bahwa tidak ada pengaruh antara *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan.

4. Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $(-0,076 < 2,017)$ dengan nilai Sig. $0,940 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan menolak H_4 yang artinya bahwa tidak ada pengaruh antara Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan.

5. Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $(-0,339 < 2,017)$ dengan nilai Sig. $0,737 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan menolak H_5 yang artinya bahwa tidak ada pengaruh antara Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung belum dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan kinerja keuangan. Permasalahan dalam pengelolaan aset di daerah yang belum baik dan optimal kemungkinan merupakan sebab tidak berpengaruhnya aset terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pengelolaan aset seperti belum optimalnya pemanfaatan aset yang ada, kurangnya pemeliharaan aset sehingga banyak aset yang rusak, ataupun penatausahaan dari segi pencatatan aset yang belum baik menyebabkan aset daerah belum dapat meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat dan juga belum dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pemerintah daerah tersebut.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sedyaningsih, 2016) dan (Ilmiyyah, 2017) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masdiantini, 2016) dan (Achmad, 2017) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan.

4.3.2 Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisis hipotesis kedua diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara kemakmuran terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun hal ini dapat diterima mengingat masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus melakukan upaya yang lebih optimal ke depannya dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar tentu memiliki tekanan yang lebih besar, dari masyarakat untuk dapat mengelola dan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya dalam perbaikan kinerja.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maiyora, 2015), (Suryaningsih, 2016) dan (Masdiantini, 2016) yang menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh dari variabel kemakmuran terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani, 2017) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kemakmuran terhadap kinerja keuangan.

4.3.3 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisis hipotesis ketiga diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan dana dari pemerintah pusat dengan baik. Sehingga berimbas pada alokasi dana perimbangan dari pusat ke daerah yang bertujuan menjembatani celah fiskal belum dapat digunakan dengan baik. Dana transfer dari pemerintah pusat sebagian besar masih digunakan untuk belanja aparatur daerah. Akibatnya dana untuk pelayanan publik menjadi lebih sedikit sehingga membuat ketidakefektifan dalam penggunaan belanja daerah.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Masdiantini, 2016) dan (Achmad, 2017) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suryanungsih, 2016) dan (Mulyani, 2017) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan.

4.3.4 Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisis hipotesis keempat diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai temuan audit BPK suatu pemerintah daerah yang kecil tidak dapat memberi kepastian bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut bernilai baik dan semakin banyaknya temuan audit BPK menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Masdiantini, 2016) dan (Parwanto, 2017) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ara, 2016) bahwa terdapat pengaruh dari variabel temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan.

4.3.5 Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisis hipotesis kelima diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara opini audit BPK terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian internal, pemeriksaan akun-akun, dan catatan akuntansi (Marfiana, 2013). Tujuan pemeriksaan tersebut berguna untuk mendeteksi ada tidaknya kecurangan (fraud) dalam pencatatan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan bukan berdasarkan jumlah atau nominal dari data keuangan tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung belum terlalu memperhatikan hasil opini audit untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Sehingga

meskipun pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mendapatkan opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian, hal ini tidak berpengaruh terhadap baik tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Marfiana, 2013) dan (Ilmiyyah, 2017) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel opini audit BPK terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sijabat, 2016) dan (Masdiantini, 2016) bahwa terdapat pengaruh dari variabel opini audit BPK terhadap kinerja keuangan.